

## **FAKTOR-FAKTOR EKOLOGIS BERASPEK ALAMIAH (STUDI KASUS LIMBAH PABRIK UDANG TERHADAP EKOSISTEM DI BULUKUMBA)**

**Andi Mentari<sup>1</sup>, Irfan B<sup>2</sup>, Siti Nur Aisyah Abdullah<sup>3</sup>, Mawar<sup>4</sup>, Desika<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan  
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Makassar  
Email\* : andimentari88@gmail.com  
Makassar, Indonesia

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor ekologi dalam administrasi negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah. Faktor-faktor ekologi atau lingkungan seperti, sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan memang sangat berperan dalam sistem Administrasi Negara maupun pada sistem administrasi pemerintahan di daerah, karena perkembangan sistem administrasi negara sebaik apapun tidak dapat dilepaspisahkan dari faktor-faktor ekologi dari sistem administrasi negara yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan administrasi negara dalam konteks pemerintahan daerah sangat diperlukan kemapanan dari administrasi negara dalam menghadapi perubahan dari faktor-faktor ekologi atau lingkungan, sehingga menimbulkan kestabilan dalam pelaksanaan administrasi negara itu sendiri dan akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya.

**Kata kunci** : Faktor Ekologi, Administrasi, Pemerintah

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to understand and explain ecological factors in state administration, especially in the context of local government. Ecological or environmental factors such as socio-cultural, religious, political, economic, legal, and defense and security play a very important role in the State Administration system as well as in the government administration system in the region, because the development of the state administration system, no matter how good, cannot be separated from the ecological factors of the state administration system concerned. Thus, it can be said that the implementation of state administration in the context of local government requires the stability of state administration in facing changes in ecological or environmental factors, so that it creates stability in the implementation of state administration itself and will have an impact on the services provided by the state to its people.*

**Keywords** : Ecological factors, Administration, Government

### **PENDAHULUAN**

Faktor-faktor alamiah memiliki peran penting dalam memengaruhi perkembangan administrasi publik, khususnya pada tataran pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari ekologi

administrasi, aspek alamiah meliputi kondisi geografis, lingkungan hidup, serta sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Keadaan alamiah tersebut dapat menentukan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Misalnya, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah membutuhkan tata kelola administrasi yang adaptif agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Selain itu, kondisi ekologis alamiah juga berhubungan langsung dengan faktor sosial budaya masyarakat setempat.

Keberagaman adat istiadat, pola hidup masyarakat pedesaan atau perkotaan, hingga keterkaitan manusia dengan lingkungan sekitar membentuk karakteristik administrasi publik di daerah tersebut. Contohnya, masyarakat yang masih kental dengan tradisi agraris tentu memiliki pola kebutuhan dan pelayanan yang berbeda dibandingkan daerah industri. Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek alamiah ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan publik yang sesuai dengan karakter wilayah, agar tercapai sinergi antara pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.

Lebih jauh, faktor alamiah juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi sektor pertanian, ekonomi, maupun kesehatan, tetapi juga menimbulkan tantangan administratif dalam penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, administrasi negara perlu mengintegrasikan aspek alamiah ke dalam perumusan kebijakan daerah. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang tanggap, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal meskipun menghadapi dinamika lingkungan yang kompleks.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah memperoleh landasan teori, menemukan celah penelitian, serta menyusun kerangka pemikiran yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dalam praktiknya, peneliti mengidentifikasi kata kunci, memilih sumber yang kredibel, membaca secara kritis, lalu mensintesis temuan dari berbagai literatur untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Limbah tambak dan pabrik pengolahan udang di Bulukumba dilaporkan menimbulkan penurunan kualitas air pesisir yang berdampak langsung pada habitat laut setempat. Keluhan masyarakat (terutama petani rumput laut) pada beberapa titik pantai menuding bahwa pembuangan limbah cair dan padatan membuat rumput laut mati, mengurangi keberagaman hayati dan menurunkan hasil tangkapan nelayan kecil. Pemeriksaan dan pengambilan sampel oleh dinas dan tim terpadu sempat dilakukan untuk memastikan adanya pencemaran, karena dugaan kerusakan ekosistem ini juga memicu konflik sosial antara perusahaan dan komunitas pesisir.

Dampak ekologis negatif yang umum tercatat (dan relevan untuk kasus Bulukumba) meliputi eutrofikasi lokal akibat tingginya nutrisi (sisa pakan, kotoran), penurunan kadar oksigen terlarut yang dapat menyebabkan kematian massal organisme non-target, perubahan struktur komunitas bentik, serta akumulasi zat organik yang mengubah kondisi dasar perairan. Studi-studi akademik dan laporan lapangan pada tambak intensif menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang buruk berpotensi menyebabkan penurunan kualitas air sungai/laut yang menerima buangan dan mempengaruhi kesehatan ekosistem pesisir. Meski begitu, terdapat juga dampak positif ekonomi dan sosial yang sering dikaitkan dengan keberadaan industri udang di daerah seperti Bulukumba: penciptaan lapangan kerja (langsung di tambak/pabrik dan tidak langsung di rantai pasok), peningkatan pendapatan bagi sebagian petani/pekerja lokal, dan peluang pengembangan industri hilir (pengolahan kulit/kepala udang menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk, pakan, atau bahan baku makanan).

Beberapa penelitian dan program lokal bahkan meneliti pemanfaatan limbah padat kepala/selubung udang menjadi produk berguna—yang, bila diterapkan dengan teknologi dan regulasi yang tepat, bisa mengubah aliran limbah menjadi sumber nilai tambah ekonomi sambil mengurangi dampak lingkungan. Rekomendasi singkat dari studi kasus ini: (1) peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/IPAL) serta pelaksanaan pemantauan kualitas air berkala; (2) penerapan pengolahan limbah terdesentralisasi atau teknologi pemulihan (mis. biofilter, kolam pengendap, pemanfaatan limbah padat) untuk menurunkan nutrisi dan bahan organik sebelum dibuang; dan (3) keterlibatan aktif komunitas pesisir dalam pemantauan dan mekanisme kompensasi bila terjadi kerusakan langkah-langkah ini membantu menjembatani manfaat ekonomi dengan perlindungan ekologi jangka panjang. (Poin-poin ini konsisten dengan temuan kasus-kasus serupa dan hasil riset yang menelaah manajemen limbah tambak/industri udang).

## KESIMPULAN

Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dalam ilmu administrasi memiliki peran penting dalam membentuk dinamika dan efektivitas penyelenggaraan administrasi publik maupun organisasi. Aspek alamiah seperti kondisi geografis, iklim, sumber daya alam, serta lingkungan fisik secara langsung memengaruhi pola kebijakan, tata kelola sumber daya, dan strategi pelayanan publik. Lingkungan alam yang mendukung akan menciptakan efisiensi administrasi melalui pemanfaatan potensi lokal dan pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan kondisi alam yang menantang menuntut adaptasi kebijakan dan inovasi dalam pelaksanaan administrasi agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemahaman terhadap faktor ekologis beraspek alamiah menjadi dasar bagi penerapan prinsip ekologi administrasi yang holistik. Dalam konteks ini, administrasi tidak hanya dipandang sebagai sistem birokrasi formal, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial-alam yang saling berinteraksi. Integrasi antara kebijakan administrasi dengan keberlanjutan lingkungan akan menghasilkan tata kelola yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Dengan demikian, faktor ekologis alamiah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan administrasi yang berdaya tahan, kontekstual, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Akbar, H. F., Turmuji, H. F., Lestari, M. D., & Abdal, M. A. J. (2021). Faktor-Faktor Ekologi Administrasi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2751–2760.
- Anjasmari, M., & Arlan, S. A. (2021). *Ekologi Administrasi Negara*. Amuntai Kalimantan Selatan : Cv. Hemat Publishing.
- Arisandi, A., & Farid, A. (2014). Dampak faktor ekologis terhadap sebaran penyakit ice-ice. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 7(1), 20–25.
- Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–8.
- Engkus. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO*, 7(1), 91–101.
- Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(1), 33–47.

- Ramdani, A., & Iskandar, A. (2025). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI BERBASIS EKOLOGI ADMINISTRASI DI INDONESIA. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 78–85.
- Relianti, A., Yusria, S., & Setiawan, E. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Terhadap Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer Dan Konstekstual Karya Dr. Sahya Anggara, M. Si. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 10(1), 1–10.
- Ririhena, W. S. (2017). Faktor Ekologis Negara Dalam Konteks Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 140–149.
- Sari, L. N., Noor, I., & Nurani, F. (2025). Sinergitas Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Ekologi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(7), 409–414.
- Soewasti, S. (1997). Aspek-aspek Ekologi dan Sosial dalam Penanggulangan" Emerging Infectious Diseases". *Buletin Penelitian Kesehatan*, 25(3), 1–8.
- Utomo, W. S., Sutriyono, & Rizal, R. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem. Jakarta : Ekologi.